**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Ackerly, Brooke dan J. True. *Doing Feminist Research in Political dan Social Science*. Palgrave Macmillan, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***.** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Budiardjo, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa.* Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja secara Seksual.* Jakarta: PT Gramedia, 1982.

1. Aziz, Zarizana Abdul dan Janine Moussa. *Kerangka Uji Cermat Tuntas: Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*. Diterjemahkan oleh Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University. *Costing A Multidisciplinary Package of Response Services For Women and Girls Subjected to Violence: A Gender Budgeting Approach, Case Study of Indonesia*. Yogyakarta: Australian Government, 2012.

Council of Europe*. Overview of Studies on The Costs of Violence Against Women and Domestic Violence*. 2014.

Cusack, Simone. *Menghapuskan Judicial Stereotyping: Akses yang Setara terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. Diterjemahkan oleh UN Women Indonesia. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2014.

Davies, Pamela. *Et al. Victimisation: Theory, Research and Policy.* Palgrave Macmillan, 2003.

Day, Tanis. *Et al.* *The Economic Costs of Violence Against Women: An Evaluation of the Literature*. Canada: The University of Western Ontario, 2005.

Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fanani, Estu. *Et al. Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medang, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005).* Jakarta: LBH Apik Jakarta, 2007.

Fadjar, A.Mukthie. *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Pers, Malang, 2013.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Genugten, Willem van. *Ed. Human Rights Reference.* The Hague: Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 1994.

Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: INDHILL CO, 1987.

Hafidhoh, Nurlayla dan Ika Yuliana. *Kewajiban Minus Konsekuensi Anggaran: Laporan Kajian Mengenai Tren Anggaran Belanja Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Daerah*. Semarang: LRC-KJHAM, 2015.

Heroepoetri, Arimbi. *Ed.* *Pengetahuan Hukum sebagai Pemberdayaan Hukum Perempuan: Hasil Pemantauan Akses Perempuan pada Keadilan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.

Heroepoetri, Arimbi. *Ed. Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum.* Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005.

Heroepoetri, Arimbi. *Et al. Pencerabutan Sumber-sumber Kehidupan: Pemetaan Perempuan dan Pemiskinan dalam Kerangka HAM.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.* Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Inter American Commission on Human Rights. *Access to Justice for Women Victims of Sexual Violence: Aducation and Health*. OEA, 2011.

Irianto, Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahyo*.* ***Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan.* Jakarta:**Nzaid, Convention Watch Universitas Indonesiadan Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat*. Profil Perempuan dan Anak Indonesia 2007.* Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 2008.

Kelompok Kerja Convention Watch. *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujdukan Keadilan Gender*. Edisi Ketiga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. 13 Pertanyaan Kunci Pemulihan Dalam Makna Luas.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh: Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan Akses Perempuan Korban terhadap Lembaga Layanan Terpadu Di Provinsi Maluku, Kepulauan Riau dan Jawa Timur*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan: Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke Masa.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh: Sebagai Korban, Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2006.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Poso: Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2002.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2005.

Latif, Abdul dan Hasbih Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.

Luhulima, Achie Sudiarti dan Ridwan Mansyur. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Convention Watch, Universitas Indonesia, 2007.

Mahfud, Mohammad. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia.* Cet. 3. Yogyakarta: Bina Aksara, 1985.

Mukarramah, Ema. *Ed. Menggugah Komitmen Negara terhadap Perlindungan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Munti, Ratna Batara. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

Oktaviani, Indry. *Et al*. *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum.* Jakarta: LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, 2005.

Poerwandari, Kristi. *Penguatan psikologis untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Seksual, Panduan dalam Bentuk Tanya-Jawab.* Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008.

Poerwandari, E. Kristi dan Rahayu S. Hidayat. *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita.* Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000.

Prakoso, Abintoro. *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2013.

Roesanto, Eko. *Et al.* Bantuan Hukum Berkeadilan Gender. Semarang: LRC-KJHAM, Semarang, 2013.

Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Perceraian, Kematian, Hak Waris, dan Perwalian.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Ritual dan Upacara Perkawinan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Rostiawati, Justina. *Et al. Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Budaya Berkeluarga.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Rumokoy, Donald Albert, dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Sahetapy, Jacob Elfinus. *Ed. Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Savitri, Niken. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000” dalam *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama.* Edisi Revisi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010.

Sidharta, Bernard Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*: *Suatu Pengantar.* Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politea, 1994.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni, 1986.

Sumarni. *Et al*. *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.

Syam, Firdaus. *Laporan Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010.

The National Council to Reduce Violence against Women and their Children*. The Cost of Violence Against Women and Their hildren*. Australia, 2009.

Tridewiyanti, Kunthi. *Et al. Ed. Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

UN Women. *In Pursuit of Justice*: Progress of the World’s Women. UN Women, 2011.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wieringa, Saskia E. *Women-Loving-Women in Africa and Asia: Report of Research Findings Trans/Sign*. Amsterdam: Riek Stienstra Fonds, 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya.* Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer.* Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

World Bank. “Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development” dalam *Women’s Voice, Agency & Participation Research Series*. World Bank, 2013.

Yentriyani, Andy. *Et al. Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

1. **JURNAL**

Luthan, Salman**.** *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.* Dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. Januari 2009.

1. **ARTIKEL LAPORAN**

Aryani, Adriana Venny. *Et al. Catatan Tahunan Tahun 2014: Kekerasan Terhadap Perempuan: Negara Segera Putus Impunitas Pelaku*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

BAPPENAS, PSPK Universitas Gajah Mada, dan UNDP. *Justice For All? An Asessment of Access to Justice in Five Province of Indonesia*. Desember 2006.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Laporan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Empirik untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di 3 (tiga) Provinsi yaitu Aceh, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur* *yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016.* Laporan tidak dipublikasikan.

Kalabahu LBH Banda Aceh. *Pemantauan dan Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. 2014.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan dari Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan*. Tidak diterbitkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Komnas Perempuan.* Laporan belum diterbitkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan: Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender. Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Laporan Pemantauan: Stop Sudah, Kesaksian Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan, SAPA Institute dan Universitas Sumatera Utara. *Laporan Konferensi Pemulihan*. Medan: Oktober 2015. Laporan tidak dipublikasikan.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). *Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013*.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). “Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah Periode November-Oktober 2014”, diakses dari <http://www.lrckjham.com/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-jawa-tengah-periode-november-oktober-2014/>

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) dan Forum Pengada Layanan. *Laporan Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan Tahun 2014.* Laporan belum diterbitkan.

Mustafainah, Aflina. *Et al.* *Catatan Tahunan Tahun 2012: Korban Berjuang Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.

Mustafainah, Aflina. *Et al.* *Catatan Tahunan Tahun 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Yentriyani, Andi. *Et al.* *Catatan Tahunan Tahun 2010: Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.

Yentriyani, Andi. *Et al.* *Catatan Tahunan Tahun 2011: Stagnansi Sistem Hukum: Menggantung Asa Perempuan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.

1. **PRESENTASI, MAKALAH, WORKSHOP, DAN DISKUSI**

Catatan Pertemuan Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay dengan komunitas korban dan perempuan pembela HAM di Jakarta, 12 November 2012.

Dewan Perwakilan Daerah RI. Laporan Kunjungan Kerja DPD RI di Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara pada 26-30 Juni 2016. Laporan tidak dipublikasikan.

Eustochia. “Laporan Kekerasan Seksual dan Kemiskinan”. Disampaikan dalam Diskusi dengan Rashida Manjoo pada tanggal 16 Oktober 2014.

Katjasungkana, Nursyahbani. “Metode Analisa Kasus Berperspektif Gender”. Makalah, tanpa tahun.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Hasil Workshop Konstruksi Hukum Kekerasan Seksual pada 29-20 Maret 2014 di Maumere, Nusa Tenggara Timur.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Konsinyering Monitoring dan Evaluasi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan pada April 2013.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pendapat dalam Sidang Uji Materiil Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Workshop Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan pada Oktober 2012.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. “FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” diselenggarakan di Kupang pada tanggal 12 Mei 2016.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. “FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” diselenggarakan di Banda Aceh pada tanggal 12 Mei 2016.

Komnas Perempuan dan Dewan Perwakilan Daerah RI. “FGD Penelitian Empirik: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” diselenggarakan di Jawa Barat pada tanggal 12 Mei 2016.

Mansyur, Ridwan. “Hak Korban, Hukum Acara, dan Pembuktian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”. Disampaikan pada Peer Review Pembahasan Hak Korban, Hukum Acara dan Pembuktian Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016.

Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan LBH APIK Jakarta. “Presentasi Analisis Putusan Pengadilan mengenai Isu Kekerasan Seksual”. Disampaikan pada Juni 2016.

Samsidar. “Hak-hak Korban dalam Perspektif HAM”. Dipresentasikan pada Telaah Kajian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tanggal 26 Mei 2016.

Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual. “Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan”. Disampaikan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2013.

Siaran Pers Komnas Perempuan. “Prioritaskan Pemulihan Korban dan Proses Hukum Pelaku Perkosaan: Bongkar Akar Kekerasan Berulang di Aceh”. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Soeprapto, Enny. “(Draft) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Beberapa Catatan Kecil”. Makalah tertanggal 31 Juli 2016, disampaikan dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik Bersama Jaringan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 1 Agustus 2016. Makalah tidak dipublikasikan.

Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. Dalam penelitian oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2015.

**“**Costing of Violence Against Women or Costing of of Laws on Violence Against Women”Disampaikan dalam Regional Seminar for Asian Parliamentarians UN Women, 2009.

“Apakah Teori Hukum Berpersfektif Feminis Itu?” Disampaikan dalam Pelatihan Konvensi CEDAW.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar* *1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)*, UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

Indonesia. *Undang-Undang Peradilan Militer*, UU No. 31 Tahun 1997, LN No. 84 Tahun 1997, TLN No. 3713.

Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia*, UU No. 5 Tahun 1998, LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3783.

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia,* UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia*. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, UU No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia. *Undang-Undang Pornografi*, UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia. *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia. *Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, UU No. 52 Tahun 2009, LN No. 161 Tahun 2009, TLN No. 5080.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU No. 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250.

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.* Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*. Perpres Nomor 10 Tahun 2011.

Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Kepolisian Nasional*. Perpres Nomor 17 Tahun 2011.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [*Wetboek van Straftrecht*]*.* Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa (United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced or Involuntary Disappearance).

Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite CEDAW PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

1. Rekomendasi Umum Nomor 33 Komite CEDAW PBB tentang Akses terhadap Keadilan.
2. **ARTIKEL INTERNET/NEWSLETTER**

Beritasatu. “Wanita Korban Perkosaan Massal di Aceh Terancam Hukuman Cambuk” diakses dari http://www.beritasatu.com/nasional/182522-wanita-korban-perkosaan-massal-di-aceh-terancam-hukuman-cambuk.html

Diarsi. *Et al*. “Layanan Terpadu: Pertautan Multi Disiplin dan Sinergi Kekuatan Masyarakat dan Negara” diakses dari <http://www.komnasperempuan.or.id/keadilanperempuan/index.php?option=com_content&view=article&id=83:standar-pelayanan-minimal-peluang-dan-tantangan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-korban-kekerasan&catid=41:tulisan-lain>

Immigration and Refugee Board of Canada. “*Philippines: The protection offered to female victims of sexual abuse”* diakses dari http://www.refworld.org/docid/4804c0db37.html

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “15 Jenis Kekerasan Seksual” diakses dari <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual_2013.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia Dalam 14 Rumpun” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/01/buku-saku-40hak.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-2016-7-maret-2016/#more-15210>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Lembar Info: Kekerasan Seksual” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers dalam Rangka Satu Tahun Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peringatan Sumpah Pemuda: Pemerintah Harus Tegas Merawat Kebhinnekaan Negara Bangsa” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-dalam-rangka-satu-tahun-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah-dan-peringatan-sumpah-pemuda-pemerintah-harus-tegas-merawat-kebhinnekaan-negara-ban/>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers Memberantas Pornografi, Menghadirkan Hukum yang Berkeadilan” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/memberantas-pornografi-menghadirkan-hukum-yang-berkeadilan/#more-5806>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual” diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasan-seksual/>

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Tatap: Berita Seputar Pelayanan.* Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

Mardira, Salman. “Korban Pemerkosaan 8 Pemuda Terancam Hukuman Cambuk” diakses dari <http://news.okezone.com/read/2014/05/07/340/981380/korban-pemerkosaan-8-pemuda-terancam-hukuman-cambuk>

Nasution, Ryan. “Diautopsi, Polisi Bongkar Makam Siswi SMP Korban Pencabulan” diakses dari http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan

Resolusi Majelis Umum PBB. “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law” dalam Resolusi Majelis Umum PBB 60/147 pada 16 Desember 2005, diakses dari [http://www2.ohchr.org/english/law/ remedy.htm](http://livepage.apple.com/)

Seller, Viseur Patricia. “The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation” diakses dari http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper\_Prosecution\_of\_Sexual\_Violence.pdf

Tashandra, Nabilla. “Komnas Perempuan: 40 Persen Kasus Kekerasan Seksual Berhenti di Polisi” diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/18281941/Komnas.Perempuan.40.Persen.Kasus.Kekerasan.Seksual.Berhenti.di.Polisi>

U.S. Department of State: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. “[*Country Reports on Human Rights Practices - 2006*](http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm)” diakses dari <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78788.htm> pada 26 Juli 2016.

Walby. “The Cost of Domestic Violence, Women and Equality Unit Research Summary 2004” diakses dari <http://www.equalities.gov.uk/pdf/Summ%20cost%20of%20domestic%20violence%20Sep%2004.pdf>

“Penelitian Ilmiah, Ini Dampak Kekerasan Seksual pada Anak” diakses dari <http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-selatan/16786-penelitian-ilmiah-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-anak.html>

1. **ARTIKEL LAINNYA**

“Buletin Sekretaris Jendral PBB No. St/SGB/2003/13 tanggal 9 Oktober 2003 tentang Tindakan-tindakan Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual” dalam *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)*. Naskah belum diterbitkan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Pemantauan Media tentang Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan.* Jakarta: 2012. Tidak dipublikasikan.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia per tahun 2013.